

**FPCI - LIPI Roundtable Discussion**  
**Global Maritime Fulcrum in Jokowi's 2nd Term:**  
**Enhancing Strategic Clarity and Policy Content**  
**Thursday, March 5th 2020**  
**PDDI Room, LIPI**

**Pembicara:**

- 1. Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc**  
*Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI*
- 2. Prof. Dewi Fortuna Anwar**  
*Research Professor of Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  
Co-Founder of Foreign Policy Community of Indonesia*

**Kata Pembuka oleh:**

- 1. Dr. Dino Patti Djalal**  
*Founder of Foreign Policy Community of Indonesia*
- 2. Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A**  
*Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*

**Moderator:**

- 1. Dr. Riefqi Muna**  
*International Political Development Researcher at LIPI*

**Kata Pembuka**

**Dr. Dino Patti Djalal**

- Saya ingin memulai dengan satu poin bahwa konsep *foreign policy* yang terpenting dari Presiden Jokowi adalah *Global Maritime Fulcrum (GMF)* atau Poros Maritim Dunia. Sebuah konsep yang secara resmi diadopsi oleh Presiden sebagai *worldview* dan konsep *foreign policy*. Tetapi, dalam periode pertama masa pemerintahan presiden Jokowi, konsep ini masih belum optimal.

- Dalam sisi terminologi, saya juga tidak mengerti mengapa kata “*global*” digunakan dalam konsep ini. Apakah realistis untuk menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia? Kenapa tidak menggunakan istilah poros maritim saja? Seperti roda yang ada porosnya di tengah dan jari-jari yang mengarah ke tengah atau porosnya. Apakah realistis untuk mengatakan bahwa Amerika, Tiongkok, Singapura, dan negara-negara lain akan berporos kepada Indonesia?
- Ada dua dimensi dari konsep GMF ini. Pertama adalah dimensi *development* seperti infrastruktur, perikanan, kilang minyak, dan sebagainya. Dimensi kedua adalah *geostrategic*. Saat ini Tiongkok mempunyai *Belt and Road Initiative* (BRI), Amerika mempunyai konsep Indo-Pasifik, dan konsep lain-lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep GMF ini diposisikan dalam *global strategic environment* yang sedang berkembang pesat dan dalam keadaan dimana geopolitik lebih dominan daripada ekonomi.
- Menurut saya, kita cenderung malu untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan geopolitik. Kita merasa tidak enak terhadap Tiongkok dan Amerika. Saat ditanya bagaimana kita menghadapi Tiongkok, Jepang, India, dan Amerika, jawaban kita cenderung malu-malu. Saya rasa dalam periode kedua pemerintahan Jokowi, kita harus mengambil posisi atau langkah yang jelas terhadap negara-negara ini.
- Tiga hal perlu diperhatikan agar konsep GMF menjadi efektif. Pertama adalah birokrasi. Apabila Kemlu ditanyai pertanyaan, apa yang mereka lakukan untuk konsep GMF ini, kita tidak akan mendapatkan banyak jawaban dalam segi kebijakan/*policy initiative* karena Kemlu masih sebagai *marginal player* dalam GMF ini. Dalam periode kedua ini, sisi birokrasi perlu diperjelas lagi bagaimana kementerian yang satu dengan yang lain saling berkoordinasi.
- Kedua adalah bagaimana mengontrol perairan nusantara secara efektif. Koordinat dan batas wilayah sudah jelas dan sudah diakui secara internasional, tetapi kita belum mempunyai kontrol efektif atas perairan nusantara. Kemampuan kita untuk mengontrol juga masih kurang. Apabila kita ingin konsep GMF menjadi efektif, kita

harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol perairan nusantara dengan efektif.

- Ketiga adalah hubungan poros dengan ranting-rantingnya secara geopolitik. Terhadap ranting-ranting seperti India atau Tiongkok, kita perlu kebijakan yang spesifik terhadap masing-masing ranting.

### **Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A**

- Apabila diperhatikan di setiap dokumen dalam periode 2020-2024, tidak ada istilah GMF. Apabila kita lihat lagi di dalam agenda Kemlu, tidak ada juga istilah GMF. Tetapi ketika kita menerjemahkan di dalam kegiatan-kegiatan nasional, sebenarnya itu mencerminkan. Pada tahun 2014, Pak Jokowi menyampaikan istilah ini pertama kali dalam inagurasinya. Tetapi istilah ini tidak pernah diturunkan secara operasional, meskipun Kementerian dan Menko Kemaritiman memberikan penerjemahannya tetapi belum secara mendalam. Tetapi pada saat inagurasi kedua, secara lisan maupun tulisan, tidak ada istilah GMF. Jadi pertanyaannya bagaimana kita memaknainya dalam politik luar negeri kita ?
- Pertanyaan yang perlu dijawab saat diskusi ini adalah bagaimana sebagai negara kepulauan kita bisa memaknai poros maritim dunia pada kerangka kepentingan nasional.

---

## Pembukaan oleh Moderator

### Dr. Riefqi Muna

- Pada hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat *contested*, berkaitan dengan GMF di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam *keynote speech* tadi yang sudah disampaikan Pak Dino maupun Bu Nuke, ada beberapa pertanyaan yang sangat substantial yang sudah dilemparkan. Saya sangat yakin diskusi ini akan menjadi sangat menarik karena pertanyaan dasarnya adalah ketika pada periode pertama, mengenai poros maritim dunia, ada juga yang mengatakannya sebagai *global maritime axis*, selain dari *global maritime fulcrum*. Menurut saya, kata *axis* ini dari sisi konotasi kurang menguntungkan dan lebih baik menggunakan kata *fulcrum*. Konsep yang digunakan begitu tegas pada saat Pak Jokowi memulai periode pertamanya tetapi ketika memasuki periode kedua, konsep ini perlahan-lahan mulai menghilang.
- Apakah ini langkah yang benar, terlebih lagi implikasinya pada kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara di satu sisi *landscape* global begitu dinamis dengan adanya konsep-konsep lain seperti BRI (*Belt and Road Initiative*), QUADS (*Quadrilateral Security Dialogue*) dan sebagainya.

## Presentasi Pembicara

### Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc

- Menurut saya, pilihan bahwa Indonesia harus menjadi *Global Maritime Fulcrum* adalah pilihan yang tepat. Itu semua dasarnya sangat ilmiah apabila dilihat dari konfigurasi negara kita. Dilihat dari sejarahnya, Presiden Jokowi ketika mendeklarasikan GMF, mengisi rentang-rentang sejarah kepedulian terhadap laut. Sejak zaman Majapahit kita telah menyatakan bahwa kita adalah Nusantara, sehingga adanya fokus terhadap laut, lalu kita lupa, bangkit lagi tokoh-tokoh seperti Bapak Kusumaatmadja, dan Bapak Juanda hingga akhirnya pemerintahan Jokowi yang sekarang.
- Tetapi ketika itu, kita tidak punya gambaran mau diarahkan kemana konsep ini. Kebetulan saya diajak Bapak Indroyono, Menko Maritim yang pertama, untuk merancang isinya Kemenko Maritim ini hendak dibentuk seperti apa. Melalui serangkaian dialog kita membuat kesimpulan ada empat komponen yang harus difokuskan, yaitu:
  1. Kedaulatan
  2. Sumber daya– menurut para ilmuwan, memang kedepannya masa depan Indonesia berada di laut.
  3. Infrastruktur dan konektivitas. Intinya bagaimana merangkai semua pulau Indonesia menjadi satu kesatuan.
  4. Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan budaya maritim. Komponen keempat menjadi esensi utama yang harus diperkuat.

Empat komponen tersebut yang Kemenko Maritim pertama dibentuk menjadi struktur organisasi. Salah satu hasil dari isi kementerian maritim adalah *National Ocean Policy*. Menurut saya kebijakannya cukup komprehensif, namun isinya lebih banyak *wishlist* dibandingkan program. Paling tidak, sebagai Perpres atau

dokumen legal, kita sudah memiliki *National Ocean Policy*, yang sebelumnya tidak pernah ada.

- Dari sini kemudian kita bergerak bagaimana kita memulai setelah terbentuknya kebijakan. Pemerintahan Indonesia tidak pernah memiliki program yang secara drastis berbeda ketika berganti presiden. Jadi memang ada program yang sudah dirancang sebelumnya dan akan sangat disayangkan apabila tidak dilanjutkan sehingga program-programnya sebagian dilanjutkan, sebagian lagi disusun baru.
- Poin yang paling penting yang ingin disampaikan adalah dari sekian banyak program strategis nasional, atau bahkan program prioritas nasional, kita belum mencerminkan bahwa kita sekarang memiliki paradigma laut. Saat ini presiden lebih banyak meresmikan jalan tol, MRT, bendungan dibandingkan pelabuhan, bandara, dan kapal perang. Saya ingin kita membuat kerangka berpikir bahwa yang namanya maritim, dalam konteks Indonesia, tidak kita konotasikan sebagai urusan laut saja. Ketika kita berbicara konektivitas, kita perlu melihat hal lain yang lebih efisien. Misalnya dari Jakarta ke Papua akan lebih efisien jika bepergian dengan pesawat. Sehingga konteks maritim laut di Indonesia juga tidak semata-mata transportasi laut saja dimana kita kombinasikan sesuai dengan efisiensi sehingga program-program pembangunan pelabuhan, *airport*, dan lain-lain bisa dikembangkan.
- Dengan melihat konfigurasi Indonesia, kita tidak bisa meniru siapapun untuk membuat apapun. Kita harus memikirkan caranya sendiri. Hal inilah yang menjadi kesulitan Indonesia. Realitanya misalnya, kita ingin menjadi *Global Maritime Fulcrum*, apa yang menjadi indikatornya? Belakangan ini, peta pelayaran di laut setiap hari berubah dan itu menunjukkan bahwa Indonesia lebih sering menjadi pasar dibandingkan menjadi produsennya. Itu salah satu poin yang kita ingin ubah. Ke depan, diyakini bahwa kondisi dunia memang akan berubah, dimana perekonomian dunia akan bergeser ke Asia-Pasifik. Nanti juga kita akan melihat alur kontainer akan melewati pelayaran. Kalau melihat gambaran seperti ini, memang Indonesia seharusnya menjadi bagian dari *Global Maritime Fulcrum*. Kita

bukan satu-satunya GMF, tetapi menjadi bagian poros yang panjang. Gambarnya dan itulah yang mungkin kita harus antisipasi.

- Dengan kondisi seperti itu, ini menjadi bukti bahwa nanti negara besar bukan lagi hanya Amerika. Ini adalah realitas juga bahwa Tiongkok dan India akan menjadi yang negara besar. Indonesia diprediksi juga akan menjadi negara besar. Dalam kaca mata kami, hal ini bagus untuk membangkitkan optimisme tapi jangan sampai hanya menjadi harapan palsu. Apa yang kita harus lakukan adalah bagaimana prediksi orang-orang ini terjadi. Karena biasanya prediksi seperti ini dibuat supaya kita terbuai juga.
- Beberapa contoh saja, Indonesia patut dipertimbangkan secara matang. Ikan paling banyak memang terdapat di perairan hangat ini. Salah satu contoh yang kita sering salah bahwa orang mengatakan kita kaya ikan. Menurut beberapa ahli, kita kaya jenisnya tapi jumlah per jenis tidak banyak. Seharusnya kita tidak bermain di *volume*. Kita tidak bersaing dalam menjual jumlah ikan, tetapi kita harus lebih mencari elemen yang sedikit tapi nilainya tinggi. Jadi dalam urusan ikan, kita seharusnya kuat di obat-obatan dan kosmetik. Inilah salah satu contoh mengapa kita tidak bisa mencontoh orang lain.
- Konsep GMF ini adalah upaya Indonesia untuk percepatan dan pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan laut sebagai wahana utama. Kira-kira itu bagaimana terjemahan kami dalam level kerja. Kenyataannya, Indonesia masih *java-centric*. Presiden juga mengatakan kita akan menggeser *java-centric* menjadi Indonesia-sentris. Kenyataannya, jika melihat proyek strategi nasional, dari sisi jumlah, sebagian besar masih di Jawa. Jadi antara visi dan harapan, perencanaan dan tindakan masih belum sejalan.
- Kita memiliki 1,33 triliun dollar per tahun untuk potensi *Indonesia Maritime Economic* dimana itu baru dimanfaatkan sebesar 9-10 persen. Sebagai contoh, kita bisa melihat *diversity* hewan laut paling banyak di Indonesia.
- Saya setuju dengan Prof. Nuke bahwa Presiden tidak lagi menyebut laut maritim. Saya yakin Presiden tidak lupa tetapi harus ada yang mengingatkan Presiden bagaimana arah laut maritim ke depan. Sejak tahun 2016, pada saat rapat antara

Menko Maritim dan Bappenas, saya mengusulkan untuk menambah kemaritiman sebagai salah satu arus utama dalam pembangunan. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada.

- Salah satu upaya teknis yang kita lakukan adalah kampanye secara besar-besaran untuk membangun di luar Jawa dengan cara memanfaatkan keseimbangan kemaritiman. Kita mengkampanyekan ini awalnya kita usulkan dengan Tiongkok tetapi kita terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja. Hal ini dilakukan sejak tahun 2017 tetapi sampai sekarang belum sepenuhnya sukses.
- Sisi lain yang menurut saya kurang sukses adalah secara program perekonomian kurang bagus dirancangnya. Pada waktu itu terdapat tiga pilar yang direncanakan, yaitu pembangunan perekonomian, IPTEK dan sosial budaya dan keamanan. Untuk pilar sosial budaya dan keamanan masih belum berkembang karena masih belum ada program yang dimiliki untuk mencegah kerusakan saat ada pihak luar yang datang ke Indonesia.
- Lima tahun ke depan, pemerintah bertekad untuk memberi perhatian lebih pada kemaritiman. Kemenko maritim akan berfokus pada industri kapal, pelabuhan-pelabuhan supaya lebih efisien, dan komponen kapal.
- Terkait *Palapa Ring Project*, karena konfigurasi kita negara kepulauan, kita tidak semudah Amerika untuk pemasangannya. Bahkan biaya pemasangannya pun lebih mahal.
- Terkait perbatasan, misalnya di Natuna, pendekatan Indonesia lebih ke politik perimbangan, mengajak orang lain supaya dominasi tidak hanya pada satu negara tersebut.
- Terkait penataan pelabuhan, jika kita ingin menjadi poros maritim, harus diperhatikan karena masih belum kuat misalnya pelabuhan Tanjung Priok masih belum sebagus pelabuhan Singapura. Kepercayaan kapal-kapal asing untuk datang ke pelabuhan Indonesia perlu ditingkatkan. Kapal tongkang akan diperbaiki karena dalam industri kapal Indonesia masih lebih banyak mengimpor daripada memproduksi sendiri.



---

**Prof. Dewi Fortuna Anwar**

- Ketika saya membaca TOR (Terms of Reference) nya, memang banyak hal-hal yang benar tetapi saya tidak sepenuhnya setuju dengan premisnya. Untuk kedepannya berdasarkan apa yang sudah kita bangun, jangan ditinggalkan tetapi tetap dikembangkan dan dibangun.
- Pada esensinya, GMF adalah suatu harapan dan *timeline* bagaimana kita menjadikan Indonesia itu sebagai kekuatan maritim. Kita sudah sejak dari lama mendeklarasikan diri kita sebagai negara kepulauan dengan dinyatakannya Deklarasi Juanda. Kemudian Indonesia mengambil langkah kepemimpinan, dimana pada waktu itu Indonesia belum berkembang seperti sekarang, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui secara internasional. Indonesia juga memainkan peran kepemimpinan dalam perumusan UNCLOS. Namun, setelah kita mendapat pengakuan negara kepulauan tidak banyak yang kita lakukan setelah itu. Setelah zaman Orde Baru, fokus pembangunan ada di darat ketimbang di laut karena adanya kepentingan politik dan masalah keterbatasan sumber daya kita.
- Selama diskusi ini tidak ada satu orang pun yang membicarakan undang-undang mengenai kelautan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2014. Pertama kalinya dalam sejarah, undang-undang itu diperjuangkan cukup lama hingga akhirnya ditandatangani pada era terakhir pemerintahan Pak SBY. Mengenai pengelolaan laut, ada 13 undang-undang yang masing-masing menyatakan untuk membuat institusi sendiri sehingga sering sekali terjadi konflik di laut dan menimbulkan banyak keluhan atas hal tersebut. Untuk mengatasi berbagai tumpang tindih atau kekosongan tersebut dibutuhkan undang-undang yang lebih komprehensif dan hal itu sudah dimulai sejak masa pemerintahan Pak SBY yang kedua. Undang-undang inilah yang memungkinkan dibentuknya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA).
- Presiden Jokowi juga berbicara bagaimana membangun identitas maritim Indonesia. Hal ini dituangkan dalam dua hal yaitu pencetusan tentang GMF dan

pembentukan Menko Kemaritiman. Jadi tidak hanya sekedar konsep tetapi ada juga institusi yang dibangun.

- GMF terdiri dari 5 pilar tetapi elemen keseluruhannya sudah ada dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Jadi benar pendapat Pak Dino bahwa idenya memang original dari Pak Jokowi tetapi substansinya sudah merupakan dalam *national policy*. Inilah alasan mengapa saya mengatakan bahwa saya optimis karena ini bukan hanya *oneman aspiration*, tetapi semua elemen yang ada di GMF ada juga di undang-undang kelautan. Lima pilar itu terdiri dari:
  1. Membangun budaya maritim.
  2. Mengelola sumber daya marine.
  3. Mengembangkan infrastruktur maritime dan konektivitas.
  4. Memperkuat ketahanan dan pertahanan maritim.
  5. Mengembangkan diplomasi maritim.
- *First Plan of Action* untuk 2016-2019 terdiri dari 76 strategi dengan lima program clusters. Jadi ini ada *action plan* yang cukup detail. Di dalam *ocean policy* ini ada dimensi eksternal dan internal. Terdapat 2 area dalam dimensi eksternal yaitu *maritime diplomacy, defence and security*. Dalam *maritime diplomacy* dikatakan bahwa Indonesia akan memainkan *leadership role* di dalam berbagai inisiatif maritim seperti kerja sama baik dalam level *regional* maupun *multilateral*. Lalu, Indonesia akan meningkatkan partisipasinya dalam kerjasama *regional* maupun internasional dalam pertahanan dan ketahanan maritim.
- Apa *external dimension* dari operasionalisasi GMF ini?
  1. *Building a strong maritime defence to protect sovereignty and territorial integrity.*
  2. *Ensuring security and safety at sea.*
  3. *Developing maritime infrastructure and connectivity.*
  4. *Maritime diplomacy* yang terdiri dari:
    - (a) *Protecting national sovereignty,*
    - (b) *Maintaining peace and stability,*
    - (c) *Supporting economic development.*

##### 5. *Strengthening cooperation in Indian Ocean and Indo-Pacific.*

- Kita melihat bahwa Indonesia meningkatkan IORA dari tingkat ministerial menjadi *summit level*. Untuk pertama kalinya diadakan *summit* di Jakarta di tahun 2017 yang menghasilkan *Jakarta Concord and Action Plan of IORA 2017-2021* yang cukup komprehensif. Kalau kita lihat banyak kemiripan dari kebijakan laut kita seperti *maritime safety and security, trade and investment facilitation, fisheries management, disaster risk management, academic science and tech cooperation, tourism and cultural exchanges*. Jadi kita ingin meningkatkan kerja sama multi dimensi dengan setiap negara-negara di Indo-Pasifik atas tujuan meningkatkan perekonomian.
- Indonesia memiliki sikap yang positif terhadap inisiatif negara-negara lain selama itu tidak bertentangan dengan visi GMF. Contohnya, Indonesia meningkatkan kerja sama bersama India dibawah kebijakan India yang bernama “*Acting East Policy*” bahkan terdapat *joint statement* antara Modi dengan Jokowi yang berjudul “*Shared Vision on Maritime Cooperation in the Indo-Pacific between Indonesia and India.*” Berikutnya peran yang utama dalam mempromosikan *ASEAN Outlook On Indo Pacific*, saya melihat ini sebagai manifestasi dari GMF.
- Untuk menutup, sekali lagi saya kurang setuju dengan kesimpulan-kesimpulan yang terlalu mengatakan ini hanyalah sebuah konsep yang tidak terealisasi. Saya berargumen GMF memiliki pondasi yang cukup *solid* karena ada undang-undang yang berlaku. Siapapun presidennya nanti dia tetap tidak bisa menghilangkan undang-undang ini. Kemudian ada *Indonesian Ocean Policy* dan itu sudah menjadi basis dari institusi. Ada juga *First Plan of Action (2016-2019)* dan ini semuanya mengikutsertakan *stake holders* yang harus bekerja sama dalam merealisasikan GMF. Kita juga memiliki strategi yang sangat komprehensif secara diplomatik baik dalam *Indian Ocean* maupun Indo-Pasifik. Namun tantangan terbesarnya adalah dalam menghubungkan masalah konektivitas Indonesia. Saya memang sedikit kecewa ketika Presiden tidak menyebut kata GMF dan tidak memprioritaskan maritim.

---

## Sesi Diskusi

*Note: Berikut ini adalah komentar dan pertanyaan partisipan ditulis berdasarkan perwakilan kelembagaan mereka.*

### **(1) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI**

- Kami setuju dengan apa yang disampaikan para pembicara dimana GMF ini memang adalah sebuah *political statement* yang menyatakan diri kepada dunia bahwa kami serius. Waktu itu saya di Jepang sebagai wakil duta besar, di Jepang mereka kaget, bertanya-tanya ada gerakan apa ini dari Indonesia. Dampaknya terasa sekali harga ikan di Tokyo meningkat berkali-kali lipat ketika kita melakukan pembatasan illegal fishing. Ternyata ikan-ikan di Jepang kebanyakan adalah hasil dari illegal fishing di Indonesia.
- Selama di Jepang, kami berhasil menginisiasi yang disebut sebagai *Indonesia Japan Maritime Forum* yang ditandatangani oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada tanggal 16 Desember 2016. Suatu langkah yang menunjukkan hasil konkret, seperti kerja sama bilateral dalam beberapa area dan kita juga mendapatkan satu kapal Bakamla dari Jepang. Kita juga menyelesaikan sebagian besar dari perjanjian-perjanjian perbatasan dengan sejumlah negara lain yang terbengkalai. Contohnya adalah dengan Malaysia di Laut Sulawesi hingga akhirnya tuntas yang sebelumnya selama bertahun-tahun tidak kunjung selesai juga. Memang masih ada kurang lebih lima lagi yang masih harus diselesaikan yaitu dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau dan Timor Leste. Ada terobosan selanjutnya yang kita buat walaupun mendapatkan tantangan yaitu kita secara resmi mengganti Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Jadi disitu konteks-konteks diplomasi kita terjadi pada waktu period pertama yang marak. Daftarnya ada, apa yang sudah dilakukan oleh semua perwakilan Kemenlu dalam konteks diplomasi maritim.

- Sekarang pertanyaannya adalah “kenapa GMF tidak ada sama sekali. Kemana dia?” dan memang betul di semua dokumen Kemenlu tidak ada, tetapi kami berjanji bahwa kami akan tetap bekerja berdasarkan diplomasi maritim yang selama ini sudah dibicarakan dan menyelesaikan lima kasus sebelumnya yang belum tuntas. Tetapi dalam *political statement* nya tidak ada sekarang, padahal diplomasi sangat penting bagi para instansi terkait.
- Katanya kita ada diplomasi ekonomi tetapi tidak ada namanya institusi ekonomi di Indonesia, itu sudah dibubarkan pada tahun 2001. Jadi kita disuruh bekerja meningkatkan diplomasi ekonomi tanpa adanya institusi yang bernama diplomasi ekonomi, hanya ada satu staf ahli bidang diplomasi ekonomi. Tetapi kita tetap mengerjakan tugas-tugas, target-target diplomasi ekonomi nya Bapak Presiden.
- Benar apa yg dikatakan oleh ibu bahwa sebenarnya masa depan diplomasi maritim kita ada di konsep Indo-Pasifik. Kalau kita menggabungkan diplomasi maritim konsep GMF dengan kebijakan luar negeri yang mendukung konsep tersebut, rumahnya yang paling tepat ada di Indo-Pasifik.

## (2) Centre For Strategic and International Studies (CSIS)

- Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Ridwan dan Bu Dewi bahwa sebetulnya secara *policy* dia tidak hilang dari periode pemerintahan kedua Jokowi. Tetapi saya pribadi melihat GMF sebagai bentuk dari *public policy*, saya merasa agak khawatir. Banyak sekali cara-cara bagaimana institusi dirancang, mobilisasi sumber daya dilakukan, dan bagaimana agensi birokrasi ditempatkan, itu sudah mengarahkan sedikit banyak institusionalisasi dari GMF tetapi tidak mengarah pada *strategic priority*. Padahal apabila kita berbicara kebijakan luar negeri, seharusnya itu berdasarkan *national interest*, atau diganti dengan *set of priorities*, tetapi yang kami tidak lihat di GMF di periode 1 lalu diteruskan periode ke 2 adalah sebenarnya *strategy priorities* seperti apa yg muncul?
- Perumusan Buku Putih diplomasi pertahanan Peraturan Menko Maritim No 128 Tahun 2019 secara jelas menyatakan bahwa ada hierarki sasaran diplomasi

kemaritiman. Pertama, melindungi kedaulatan wilayah. Kedua, memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia dan keterhubungan antar wilayah di Indonesia. Ketiga, memastikan stabilitas kawasan yang berbasiskan aturan hukum internasional. Keempat, muatan kapasitas internasional. Apabila kita melihat 4 tujuan ini sebagai *hierarchy of goals*, jelas bahwa apabila kasus Natuna terjadi maka kerja sama ekonomi akan diberhentikan karena urusannya ada kaitannya dengan teritori.

- Bagaimana lembaga - lembaga Indonesia yang berkaitan dengan GMF dan kebijakan luar negeri memaknai ini? Apakah pemaknaannya sudah seragam atau belum? Apakah justru ketika kasus-kasus yg *highly politics* seperti Natuna terjadi, malah tidak ada prioritas kebijakan luar negeri yang jelas. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menjalin relasi dengan Tiongkok. Apakah kita melihat kasus Natuna dengan Tiongkok dilihat dari kaca mata kemaritiman atau kaca mata investasi dimana keduanya merupakan portofolio dari Kemenko Kemaritiman. Jadi bagaimana *competing interest* ini di sinkronisasi dalam prakteknya sebagai kebijakan luar negeri Indonesia?
- Bagaimana Kemenko Kemaritiman dan Kemenlu bekerja bersama-sama? Bagaimana koordinasinya ketika ASEAN atau Indo Pacific itu dikesampingkan, proses birokrasi yang terjadi di dalamnya seperti apa? Apakah ada sinkronisasi atau tidak? Atau justru kesinambungannya hanya terjadi karena ada tema-tema yang menggaung dan yang sebenarnya sudah berjangkar di politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang sudah digariskan di era sebelumnya.

### (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

- Hal yang masih menjadi kebingungan saya adalah apakah ada praktik/taktik yang jelas dan *tangible* misalnya kalau kita buat konteks, kita masih menyisakan beberapa segmen laut yang belum selesai. Kemudian ketika dalam konsep poros dunia ini kemudian kesana ada aksi 2016/2017 kemudian nanti juga menjalankan

rencana aksi yang kedua. Apakah misalnya kemudian dari beberapa yang belum selesai itu setidaknya selesai.

- Tetapi Perjanjian terakhir yang sudah diratifikasi itu adalah ZEE Indonesia dengan Filipina pada zaman Pak SBY tahun 2014. Setelah itu saya belum mendengar lagi perkembangan yang lain yang mungkin sudah selesai. Padahal kita masih ada segmen yang ada di Laut Sulawesi antara Indonesia dengan Malaysia, yang sudah selesai negosiasinya tapi belum diformalisasi.
- Kemudian kita masih masalah ZEE Indonesia dengan Vietnam yang belum selesai yang kemudian menyebabkan kenapa banyak nelayan-nelayan dari Vietnam yang berani untuk memasuki wilayah kita. Masalah dengan Malaysia, Palau, dan Timor Leste juga masih belum selesai.
- Seberapa besar persentase kontribusi dari tangkapan hasil laut terhadap perdagangan nasional maupun internasional?
- Kemudian terkait dengan dalam konteks konektivitas. Ketika berbicara tentang GMF itu adalah visi yang besar tetapi jangan juga dilupakan aspek-aspek kecil, tradisional yang sudah lama berjalan. Contohnya, di tahun 2014 Indonesia dengan Malaysia merundingkan kembali kerjasama Border Crossing Agreement (BCA) yang sudah disetujui sejak 1967 kemudian direvisi kembali. Dalam perundingan tersebut, Malaysia bersikukuh untuk menutup semua pos lintas batas yang sifatnya laut dan hanya mau membuka pos lintas batas darat. Ada kemunduran dalam konteks masyarakat yang tadinya sudah terbiasa berinteraksi lintas batas, tidak terfasilitasi oleh perjanjian yang sedang dijalankan Indonesia dengan Malaysia.

#### **(4) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)**

- Menyangkut tentang Selat Malaka dan terkait dengan Indo-Pasifik. Menurut saya, di daerah Indo-Pasifik, daerah yang paling mumpuni adalah Sabang, karena Sabang sejak dari zaman Belanda sudah ditetapkan menjadi area *free trade zone*. Kemudian dimatikan kembali, dihidupkan kembali hingga pada tahun 1958 dimunculkan kembali. Tetapi saya melihat Sabang itu tidak mewakili sebagai apa yang disebut *Free Trade Zone (FTZ)*, atau KPBPB (Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas). Padahal di atas kertas Sabang itu selain sebagai KPBPB dia juga berfungsi sebagai KSN (Kawasan Strategis Nasional). Kami melihat kenapa Sabang itu tidak optimal dalam menjalankan perannya sebagai FTZ. Padahal apabila dilihat dari hubungannya dengan India, dia sangat dekat dengan Kepulauan Nikobar dan Andaman dan ini menjadi satu potensi yang besar. Jadi bukan hanya Natuna saja yang mungkin kita sangat prihantinkan, tapi ada sisi lain yang perlu kita optimalkan dan fokuskan sehingga kedepannya bisa menjadi titik masuk dan titik keluar terhadap kawasan Indo-Pasifik.
- Melalui Global Fishing Watch, kita bisa melihat bahwa daerah-daerah yang banyak terdapat kawasan fishing zone itu memang berada di Samudra Hindia, kemudian ke bawah di Pulau Sumatra, Pulau Jawa bagian utara mendekati Pulau Kalimantan kemudian Natuna juga demikian. Hingga yang terlepas dari fokus kita adalah kawasan Samudra Pasifik di atas Pulau Papua yang banyak terdapat pulau-pulau kecil. Banyak sekali nelayan-nelayan, entah darimana bermain di daerah ZEE Indonesia. Harapan kita, janganlah pemerintah terlalu fokus ke kawasan bagian barat Indonesia, kawasan timur pun juga sama pentingnya.
- Penting untuk menjadi perhatian bagi kita semua bahwa konsep GMF itu tidak hanya bermain dalam pembangunan infrastruktur, tetapi kelembagaan juga penting. Secara internal seperti yang sudah dijelaskan kita masih belum kuat dimana Pemda satu dengan yang lain belum bisa bersinergi dengan baik.

##### (5) Paramadina Graduate School of Diplomacy



- Menurut saya, identitas Indonesia sebagai negara maritim itu pasti setiap pemerintah terinspirasi terhadap identitas tersebut. Identitas negara maritim sudah ada dari dokumen BPUPKI, kemudian era pemerintahan Presiden Soekarno dengan Deklarasi Juanda, era Presiden Soeharto pun dengan *border diplomacy* hingga dibentuknya UNCLOS. Identitas tersebut tetap ada dalam Indonesia siapapun pemerintahannya. Sehingga hal tersebut bukanlah menjadi kebijakan dominasi milik sebuah pemerintahan.

## (6) Lembaga Ketahanan Nasional RI

- Saya hanya ingin mengklarifikasi saja bahwa kalau kita melihat dari perspektif geopolitik, memang tidak dapat disangkal Indonesia memang menjadi suatu *link* bagian dari keseluruhan. Sekarang ini tidak terdengar betul bahwa kita mempunyai suatu posisi geopolitik yang strategis. Kalau kita ke kanan ada Indo-Pasifik, apabila ke kiri ada BRI. Artinya kalau kita bergeser ke kiri, kiri yang menang, bergeser ke kanan, kanan yang menang. Indo-Pasifik pendekatannya adalah *security* sementara BRI adalah ekonomi dan kita berada di tengah-tengah. Ini yang sering kita diskusikan apakah ini menjadi interest kita atau tidak? Karena itu akan menjadi satu poin saat kita membutuhkan dan berperan dalam dunia tersebut. *Missing linknya* dari kita. Itulah kenapa kita harus menyambungkan dari Sabang sampai Merauke. Mohon klarifikasinya apakah GMF masih dalam pemikiran kita.

## Dr. Dino Patti Djalal

- Permasalahan saya adalah dengan konsepnya bukan substansinya. Konsep yang digunakan adalah poros atau fulcrum. Apabila kita memakai istilah poros, setelah masa pemerintahan Jokowi selesai, penerusnya akan bertanya “kita menjadi

poros atau pusat untuk siapa?” dan itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena dari itu, saya tidak terlalu nyaman dengan istilah poros.

- Tiongkok menjadi poros untuk konsep BRI nya. Singapura menjadi poros karena dia adalah pusat navigasi atau pusat pelabuhan. Jepang juga adalah poros karena dia adalah negara maritim. Korea juga adalah poros karena dia adalah negara produksi kapal terbesar di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Saya hanya mempertanyakan kredibilitas kondisi kita. Ambisi kita seharusnya janganlah menjadi poros global karena itu tidak akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Ambisi kita seharusnya adalah menjadi *credible maritime power* atau *credible maritime nation*.
- Poin kedua saya adalah mengapa konsep GMF ini menjadi exciting bagi banyak orang? Karena itu mencerminkan bahwa di tahun 2014 ada sebuah *grand strategy* dengan label GMF. Permasalahannya adalah *policy content* nya tetap ada, saya setuju. Tetapi tanpa label atau *strategic linking* yang jelas ini semua hanyalah bisnis seperti biasa. IORA, diplomasi maritim, konektivitas, negosiasi batas negara tidak akan terjadi.
- Ketiga, untuk *specific policy* nya, jadikanlah Natuna sebagai pusat terdepan dari strategi maritim kita, dengan atau tanpa konflik dengan Tiongkok. Saya kira ini bisa tercapai dalam waktu lima tahun. Lalu, yang sangat terasa sekarang adalah kompetisi *naval* antara Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia, India, dan negara-negara lainnya. Saya kira kita perlu berpikir *neighbor policy* Indonesia seperti apa, dan bagaimana Indonesia menyikapi kompetisi *naval* yang sangat intens ini. Saya yakin apabila ini kita bisa rumuskan, ini akan membuat konsep *global maritime power* menjadi kredibel.

**Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M. Sc**

- Masukan dari Bapak/Ibu/Saudara akan kami kelola untuk menjadi kerangka kerjanya poros maritim tahap kedua mungkin pada lima tahun ke depan.

- Memang tadi kritik dari Pak Dino cukup *fair*. Ketika kita menganggap waktu kita yaitu waktu maksimum pemerintahan Pak Jokowi adalah sepuluh tahun, tetapi kita mempunyai pentahapan juga, sehingga apabila kita berbicara jangka panjang dimana *strategic thinkingnya*? Kemudian dalam jangka pendeknya ini yang coba kita turunkan sehingga hal-hal yang dapat dilihat dalam periode sepuluh tahun ini juga terasa keberadaanya. Untuk jangka panjang, saya setuju semua dan nanti kita kelola pemikirannya seperti apa. Jangka pendek ini adalah tantangan terbesar menurut saya. Pertama, ketika kita ingin bermain menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, pelabuhan kita harus bagus dimana kapal berminat untuk singgah, menurunkan dan mengangkat muatannya. Namun itu belum terjadi sekarang ini, kami kewalahan bersama dengan Pak Luhut, hanya satu kapal saja dengan biaya 30 triliun di pelabuhan. Kami masih kembangkan dan tidak bisa lima tahun membuatnya karena kita harus membangun industrinya juga untuk apa yg mau diangkut.
- Kedua adalah konteks kerja sama. Karena kita tidak mungkin sendiri, kita harus bekerja sama. Komitmen kerja sama yang terjelas adalah dengan Tiongkok. Mengkapitalisasi kekuatan mereka untuk kepentingan kita. Misalnya mereka sekarang ingin membangun Pulau Tanjung. Awalnya kita tidak mau memberikannya karena letaknya ada di Selat Malaka dan kita maunya Tiongkok tidak ada di Selat Malaka. Tetapi negara yang lain tidak ada yang masuk, jadilah akhirnya kita memberikannya kepada Tiongkok. Namun *strategy* pengelolaannya jangan sampai didominasi oleh Tiongkok.
- Ketiga adalah strategi internal. Dahulu kita ada Pendulum Nusantara, dua International Hub Ports, poros maritim dan itu semua tidak pernah berujung. Jadi konsep semua bagus, dokumen hebat-hebat tetapi selesai di dokumen itu saja. Sekarang keluar lagi yang disebut Integrated Port Network yang mengatakan tujuh hubnya. Pertanyaannya adalah apakah dua atau tujuh hub? Pada tatanan konsep jangka panjang kita bisa mematangkan tetapi pada realita jangka pendek dan menengah ini yang menurut saya yang selalu dikejar orang. Kompetisi internal

yang tidak diperlukan ini harus diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang jelas.

### Prof. Dewi Fortuna Anwar

- Pertama apapun yang kita namakan konsepnya, bagaimana merealisasikan Indonesia sebagai *maritime state*? Wawasan nusantara itu sudah ada dalam DNA kita. Apa isinya wawasan nusantara itu? Yaitu salah satunya adalah menjadikan negara maritim yang kredibel dalam aspek ekonomi, budaya, SDM, pertahanan, keamanan, lingkungan dan sebagainya. Kalau dilihat dari GMF, undang-undang kelautan itu pada dasarnya mengelola seluruh wilayah NKRI dan menjadikan konsep tanah air itu benar-benar terealisasi. Ini berbicara bagaimana kita mengelola ke dalam.
- Kemudian, kita juga harus memastikan untuk bekerja sama dengan pihak luar. Ada aspek ke dalam dan ada aspek ke luar, itu tidak bisa dipisahkan. Secara geografis, kita berada *in the middle*. Negara mana yang punya pantai di Pasifik dan di Samudra Hindia? Hanya Indonesia dan Australia dan tidak ada lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelola keadaan geografis Indonesia ini? Bagaimana kita memanfaatkannya secara optimal? Dengan menamakannya, itu memberikan kita *a wake up call*. Ini bukan berbicara tentang poros tetapi berbicara tentang fakta geografis Indonesia dan itu harus kita manfaatkan. Ini juga bukan kebijakan lima atau sepuluh tahun, namun bagaimana kita harus berjangka panjang, sehingga kita tidak dijadikan hanya sebagai tempat persinggahan. Tidak hanya orang lewat sambil membuang sampah, mencuri ikan.
- Jadi saya tidak setuju, menurut saya konsep GMF itu konsep yang mengoptimalkan keadaan geografis Indonesia menjadi sesuatu yang lebih. Tanpa adanya impetus konsep GMF, IORA tidak akan menjadi summit, Indonesia tidak akan berperan dalam Indo-Pasifik.



FOREIGN POLICY  
COMMUNITY  
OF INDONESIA

**FOREIGN POLICY COMMUNITY OF INDONESIA**

Mayapada Tower 1 lantai 19 unit 02  
Jl. Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan 12920  
Email: sekretariat@fpcindonesia.org

---